

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan pemilihan untuk memilih kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat setempat yang memenuhi syarat perundang-undangan. Pilkada menjadi salah satu ciri dari negara demokrasi. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada.

Melihat kembali konteks pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.” Makna dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah bahwa ketentuan tersebut mengandung arti bahwa pemilihan itu harus dilakukan dengan cara yang demokratis, yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih secara langsung atau cara lain sesuai dengan keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur dengan Undang-Undang, tetapi tetap kedaulatan di tangan rakyat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sodikin.2014. Kedaulatan Rakyat Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Cita Hukum*. Vol.1(1) Hal 102

Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan suatu kelembagaan baru untuk mewujudkan proses demokratisasi di daerah yang telah dilaksanakan semenjak tahun 2005 yang didasari oleh UU No 32 Tahun 2004. Pilkada langsung merupakan terobosan politik yang signifikan dan berimplikasi cukup luas terhadap daerah dan masyarakatnya untuk mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Pilkada langsung merupakan proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Pada dasarnya, Pilkada langsung merupakan daulat rakyat sebagai salah satu realisasi prinsip-prinsip demokrasi yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak politik.<sup>2</sup>

Pada Tahun 2020 pemilihan kepala daerah serentak kembali dilaksanakan pada Tanggal 9 Desember 2020. Namun ada yang berbeda dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 terjadi, karena berlangsung di tengah wabah pandemi covid-19 yang menyerang seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebanyak 270 daerah menggelar pilkada serentak yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.<sup>3</sup>

Walaupun digelar pada masa pandemi Covid-19 Pilkada Tahun 2020 tetap berjalan. Akan tetapi politik identitas saat Pilkada masih terus terjadi. Realitas Pilkada dikaitkan dengan politik identitas yang kental dengan persaingan kandidat yang mengatasnamakan suku, asal daerah, etnis, agama. Identitas tersebut dipergunakan oleh para calon kandidat untuk menarik suara dari masyarakat.

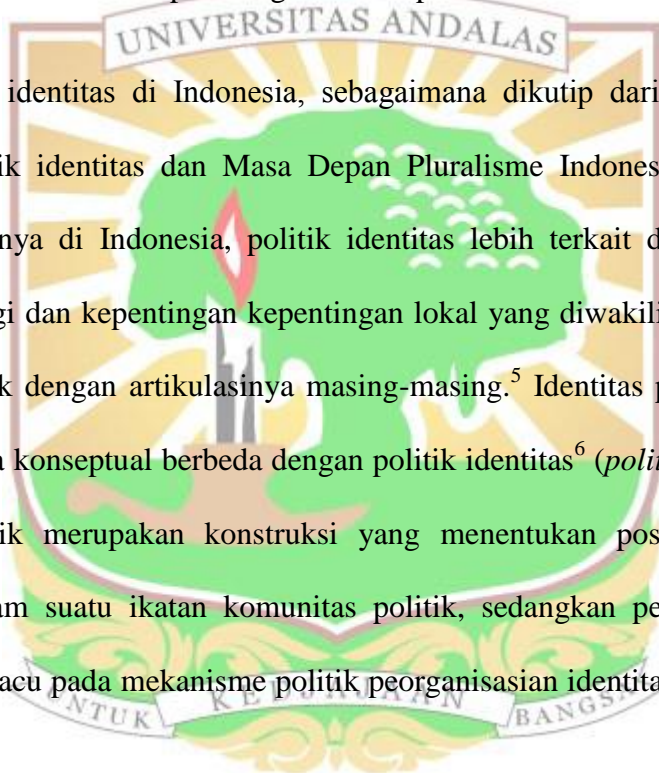
---

<sup>2</sup> Hanafi, Ridho Imawan. 2014. Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*. Vol.11(2) Hal. 2-3

<sup>3</sup> <https://news.detik.com/berita/d-4596501/ini-270-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-2020> diakses pada 10 november 2020 pukul 15.53

Pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, gerakan politik identitas semakin jelas wujudnya. Bahkan, banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam *power-sharing*. Di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Banten, Kalimantan Barat dan Irian Jaya menguatnya tingkat sensitifitas dari identitas politik di daerah-daerah yang secara nyata menunjukkan betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain<sup>4</sup>.

Politik identitas di Indonesia, sebagaimana dikutip dari Ma'arif dalam bukunya *Politik identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*, menjelaskan bahwa khususnya di Indonesia, politik identitas lebih terkait dengan etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili umumnya oleh para elit politik dengan artikulasinya masing-masing.<sup>5</sup> Identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan politik identitas<sup>6</sup> (*political of identity*). Identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam suatu ikatan komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik peorganisasian identitas (baik identitas



<sup>4</sup> Muhtar Hamodin.2012. Menguatkan Politik Identitas di Ranah Lokal.Universitas Brawijaya Malang, *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol.3 No.1. hal 117-118

<sup>5</sup> Maarif, Ahmad Syafii. 2012. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project. Hal 3

<sup>6</sup> Politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Politik identitas merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk mencapai tujuan tertentu, dimana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor-faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya suatu tekanan berupa ketidakadilan politik yang dirasakan oleh mereka. Lebih lanjut lihat Sri, Lestari Yeni. 2018. Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Jurnal of Politics and Policy*. Vol 1 (1). Hal 21. Lebih lanjut lihat Alfaqi, Mifdal Zusron. 2015. Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas . *Jurnal pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 28 (2). Hal 113.

politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik.<sup>7</sup> Identitas selalu melekat pada setiap individu dan komunitas. Identitas merupakan karakteristik yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain supaya orang tersebut dapat dibedakan dengan yang lain. Identitas adalah pembeda antara suatu komunitas dengan komunitas lain.

Saat ini identitas bukan hanya suatu hal yang melekat pada diri seseorang semata, tetapi identitas sudah berubah menjadi alat politik dalam menarik simpati publik. Identitas semakin lama menjadi cara bagi pasangan calon untuk maju dalam pemilihan khususnya dalam area lokal dengan dalih mewakili kelompok tertentu dalam kontestasi demokrasi. Politik identitas mempunyai peran yang andil dalam mencapai proses kekuasaan. Politik identitas bertindak seolah-olah identitas merupakan etnis yang stabil sehingga di asaskan pada esensialisme strategis demi tujuan politis tertentu, karena politik identitas tidak pernah sepi dalam setiap gelanggang politik di Indonesia.

Isu politik identitas yang selalu ada disetiap kontestasi politik di Indonesia kadang mendapatkan pertentangan dari kelompok yang mengatasnamakan nasionalisme yang menjunjung tinggi segala macam perbedaan yang ada dan telah diakui bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, peran politik identitas dalam merebut kekuasaan politik dinilai berhasil, dalam beberapa penelitian yang menunjukkan peran dari politik identitas dalam mempengaruhi pemilih menjadi bagian yang penting dalam ajang kontestasi politik.

---

<sup>7</sup> Setyaningrum, Arie.2005.*Memetakan lokasi bagi politik identitas dalam wacana politik poskolonial dalam "Politik perlawanan"*. Yogyakarta: IRE. Hal 19

Penelitian tentang politik identitas menarik bagi beberapa peneliti seperti Saepudin dkk (2017) dengan judul “Jawara Dan Pemilu: Peran Jawara Sebagai Identitas Politik Di Dalam Pemilihan Kepala Daerah Banten”<sup>8</sup>. Akbar Riyadi, dkk (2018) ” Politik Identitas Masyarakat Jawa Pasaman Barat dalam Pilkada di Kabupaten Pasaman Barat”.<sup>9</sup> Saepudin dkk dalam penelitiannya menemukan bahwa menguatnya peran jawara memberikan pengaruh di bidang sosial, ekonomi dan politik yang ada di Banten dan memiliki pengaruh untuk memenangkan kandidat yang mereka usung. Adanya simbiosis mutualisme antara Jawara dan penguasa lokal. Jawara juga sebagai *suporrtter* dan *vote getter* dalam Pilkada karena memiliki basis massa. Banten menjadikan jawara sebagai identitas dalam pemilihan calon-calon eksekutif dan legislative.

Akbar Riyadi dkk (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa kelompok minoritas etnis Jawa mampu memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada tahun 2015. Etnis Jawa sebagai minoritas memiliki pengaruh untuk memenangkan calon tersebut. Pemenangan dilakukan dari etnis Jawa dari paguyuban Jawa dengan memberikan hak suaranya. Padahal dengan melihat persentase etnis di Kabupaten Pasaman Barat seharusnya etnis minang dengan mandailing dapat dengan mudah memenangkan kontestasi Pilkada.

---

<sup>8</sup> Saepudin&Firmansyah,J. 2017.Jawara Dan Pemilu: Peran Jawara Sebagai Identitas Politik Di Dalam Pemilihan Kepala Daerah Banten. *Jurnal Bawaslu* .Vol.3 No. 2. Hal 229

<sup>9</sup> Riyadi, akbar. Dkk. 2018. Politik Identitas Masyarakat Jawa Pasaman Barat dalam Pilkada di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Forum Ilmu Sosial*. Vol 45 (2). Hal 77

Dari paparan kedua penelitian di atas secara umum membahas mengenai pengaruh etnisitas kelompok terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah dari perspektif politik identitas oleh suatu kelompok. Dalam penelitian tesis untuk magister oleh Akbar Riyadi tahun 2018 berusaha mengupas bahwasanya kelompok etnis minoritas mampu mempengaruhi agenda pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat. Dalam hal ini, peneliti membahas mengenai pengaruh kelompok etnis minoritas pada pilkada di Bukittinggi tahun 2020.

Sumatera Barat yang merupakan salah satu dari sedikit daerah administratif setingkat provinsi yang daerahnya identik dengan Budaya Minangkabau. Kebangkitan identitas agama dan budaya etnik Minangkabau ditandai dengan munculnya Perda Nagari, sebuah peraturan provinsi untuk mengembalikan sistem pemerintahan desa ke sistem pemerintahan otonom Nagari.<sup>10</sup> Penerapan Perda Nagari yang menegaskan identitas agama dan etnik “Adat Basandi Syara’: Syara’ Basandi Kitabullah” merupakan politik identitas etnis Minangkabau di seluruh daerah Sumatera Barat termasuk daerah yang dihuni oleh etnik lain seperti di perkotaan, daerah pinggiran dan perbatasan tanpa terkecuali.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Secara *Histografi, ethnografi* dan adat Minangkabau selalu menekankan bahwa Nagari adalah kesatuan sosial utama yang dominan yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu Nagari adalah sistem kemasyarakatan asli minangkabau. Lebih lanjut dapat dilihat Afwadi. 2010. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari: Antara Format Adat Atau Format Negara. *Jurnal Juris*. Vol 9(1). Hal 49

<sup>11</sup> Rozi, Syafwan. 2013. Konstruksi Identitas Agama Dan Budaya Etnis Minangkabau Di Daerah Perbatasan. *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Vol 39 (1). Hal 216

Fenomena menarik mengenai menguatnya isu politik identitas juga terjadi di Kota Bukittinggi. Meskipun Kota Bukittinggi sendiri juga merupakan daerah yang mempunyai keberagaman. Di Kota ini selain didominasi oleh etnis Minangkabau, namun juga terdapat etnis Melayu, Tionghoa, Jawa, Tamil, dan Batak. Dengan beragamnya etnis yang berada di Kota Bukittinggi yang juga merupakan kota wisata, namun isu asal usul etnis muncul dalam kontestasi Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020.

Isu etnis dan asal usul daerah ini bisa mempengaruhi masyarakat secara tidak langsung dengan anggapan bahwa calon kepala daerah yang akan maju merupakan pemimpin yang mengerti akan inti permasalahan yang terjadi di suatu daerah tersebut. Bagi masyarakat Bukittinggi selama ini beranggapan bahwa pemimpin yang mengerti tentang permasalahan di Kota Bukittinggi adalah masyarakat asli Bukittinggi yakni *Urang Kurai*. Kota Bukittinggi sendiri memiliki penduduk asli Bukittinggi yang dinamakan dengan masyarakat kurai atau *Urang Kurai*.<sup>12</sup> Masyarakat *Kurai* sendiri biasanya identik dengan kepala daerah yang berasal dari masyarakat *Kurai* tersebut dapat dilihat dari beberapa tahun terakhir yang memimpin Kota Bukittinggi merupakan masyarakat *Kurai* itu sendiri.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Masyarakat Kurai adalah sebutan untuk masyarakat asli dari Bukittinggi, sebuah kota kecil yang dikelilingi Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

<sup>13</sup> Menurut Hadji Mohammad Hadjerat bergelar Datoek Saidi Maharadjo yang pernah menjadi Wali Nagari Kurai Limo Jorong selama tahun 1947-950. Masyarakat Kurai berasal dari Pariangan: Padang Panjang, menurun ke Tanjung Alam (Batu Sangkar). Adapun nama Kurai Limo Jorong adalah sama dengan penamaan Kurai yang dikenal pada saat ini. Kurai Limo Jorong, dinamakan demikian karena pada awalnya masyarakat menghuni kelima Jorong yakni Tigo Baleh, Koto Selayan, Mandiingin, Guguk Panjang, dan Aur Birugo. ( lebih lanjut dapat dilihat di Anggraini, Febri. 2018. Eksistensi Masyarakat Kurai di Bukittinggi. *Jurnal Analisis Sejarah*. Vol 7 (1). Hal 49

Padahal Kota Bukittinggi sebagai kota wisata dan kota perdagangan yang mendatangkan banyak orang dari luar dan menetap di Kota Bukittinggi yang menjadikan barometer bagi penulis untuk mengkaji kemajemukan identitas (etnis) untuk melihat apakah ada politik identitas yang digunakan oleh suku *Kurai* atau *Urang Kurai* ketika berlangsungnya pemilihan kepala daerah Kota Bukittinggi tahun 2020. Namun, pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 lalu ada yang sedikit berbeda dan menjadi fenomena baru yang terjadi dengan kemenangan walikota yang bukan merupakan *Urang Kurai*.

Berdasarkan penelitian yang peneliti kutip dari Skripsi Romi Saputra yang berjudul *Modal Politik Pasangan Independen Muhammad Ramlan Nurmatias-Irwandi Pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2015*<sup>14</sup>.

Gelar datuak merupakan gelar yang tidak dimiliki sembarang orang, datuak dianggap adalah orang yang paham tentang adat istiadat minangkabau juga sekaligus sebagai penjaga kekayaan tradisi Minangkabau. Pasangan Muhammad Ramlan Nurmatias-Irwandi yang menjadi walikota bukittinggi periode 2015-2020 merupakan penduduk asli Kota Bukittinggi yang biasa disebut dengan *urang kurai*, Ramlan Nurmatias yang bergelar Dt. Nan Basa dari *Suku Koto* dan Irwandi yang bergelar Dt. Nan Batujuah dari *Suku Pisang* yang memperkuat dukungan dari segi modal kebudayaan cukup kuat kepada pasangan Muhammad Ramlan Nurmatias-Irwandi yaitu dukungan dari *Urang Kurai* yang merupakan penduduk asli Kota Bukittinggi.

Seperti yang terjadi Walikota Bukittinggi tahun 2020 di menangkan oleh orang luar *Kurai* Erman Safar yang berpasangan dengan Marfendi. Peranan niniak mamak dalam Pilkada yang memiliki hubungan jaringan dengan anak kemenakan dan anggota kaumnya. Niniak mamak sangat berperan penting dalam proses

---

<sup>14</sup> Saputra, Romi. 2017. Modal Politik Pasangan Independen Muhammad Ramlan Nurmatias-Irwandi Pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2015. *Skripsi*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas.. Hal 67-70



Pilkada. Dukungan yang diberikan iniak mamak kepada salah satu calon juga dapat mempengaruhi kepada pilihan anggota kaumnya terhadap calon nantinya. Peranan yang diberikan iniak mamak juga mempengaruhi kemenangan dan perolehan calon pada pemilihan.

Namun, kenyataan yang terjadi saat ini dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang lalu, ternyata di menangkan oleh bukan orang *Kurai* yaitu Erman Safar yang berpasangan dengan Marfendi dan mengalahkan *Incumbent* yang merupakan asli *Kurai*. Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan ruang lingkup tidak terlalu luas maka berdasarkan latar belakang penelitian diatas permasalahan yang akan diteliti secara rinci peneliti lebih memfokuskan untuk meneliti politik identitas masyarakat kurai pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kota Bukittinggi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kota Bukittinggi termasuk kedalam salah satu kota di Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 lalu. Menariknya yang memenangkan pertarungan pada Pilkada 2020 dari salah satu pasangan justru bukan masyarakat asli Kota Bukittinggi (*Urang Kurai*) Erman Safar yang berpasangan dengan Marfendi. Hal tersebut membuat pilihan politik atau pilihan kepala daerah masyarakat menjadi beragam biasanya masyarakat Kota Bukittinggi memilih kepala daerah yang akan memimpin Kota Bukittinggi berasal dari *Urang Kurai*. Dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah.<sup>15</sup> Pada Pilkada tahun 2020 kali ini Kota

---

<sup>15</sup> Lihat pada tabel 1.1 walikota Bukittinggi 3 periode terakhir Hal 8

Bukittinggi memiliki 3 pasang calon yang akan bertarung memenangkan kontestasi politik di Kota Bukittinggi seperti yang dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2020**

No Urut	Nama Bakal Calon	Uraian	Partai Pengusung	Asal Daerah
1	Ramlan Nurmatias - Syahrizal	Calon Walikota Wakil Walikota	Perseorangan/ Independen dan didukung oleh partai (Demokrat, PPP, PBB, PDI-P, Hanura)	Kurai Koto Salayan - Kurai Bukit Apit Puhun
2	Erman Safar - Marfendi	Calon Walikota Wakil Walikota	Gerindra, PKS, Golkar	Kamang - Kurai Aur Kuning
3	Irwandi David Chalik	Calon Walikota Wakil Walikota	PAN, PKB, NasDem	Kurai Ateh Ngarai ( Bantolaweh) - Kampung Halaman Benteng Pasar Atas

*Sumber : Diolah dari berbagai sumber*

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa salah satu di antara tiga calon walikota Bukittinggi bukan merupakan orang Kurai yaitu Pasangan Erman Safar – Marfendi mendapatkan nomor urut dua yang diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai PKB, Partai NasDem. Erman safar yang merupakan calon termuda pada Pilwako Kota Bukittinggi merupakan orang asli Kamang Kabupaten

Agam yang memulai karir sebagai pengusaha muda di Bandung. Sedangkan pasangannya Marfendi berasal dari masyarakat asli *Kurai* Aur Kuning yang mengawali karirnya dengan bekerja di sekretariat AKABAH Bukittinggi, Marfendi yang lahir dan menamatkan sekolah menengah pertama / MTSn nya di Bukittinggi, kemudian Marfendi melanjutkan sekolah ke luar Kota Bukittinggi yaitu di KMI Gontor. Karir marfendi menjadi sekretariat AKABAH tidak berlangsung lama, kemudian ia mengajar di Padang Panjang. Lalu menjadi dosen di Ma'had Almadaniy dan PGTK Adzki. Marfendi sukses membangun karirnya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan juga sebagai pengusaha swasta dan bertempat tinggal di Kota Padang sebelum mencalon sebagai wakil walikota Bukittinggi<sup>16</sup>.

Pelaksanaan Pilkada langsung memberikan wadah atau ruang bagi bagi elite-elite di daerah untuk mengaspirasikan gagasannya guna kepentingan masyarakat. Secara tidak langsung elite lokal mempunyai kedekatan emosional dengan masyarakat, dengan harapan kedekatan yang terjadi antara elite lokal dengan masyarakat dapat memberi dampak atau sumbangsih terhadap pelaksanaan Pilkada. Keterlibatan tokoh adat, atau elite lokal dalam Pilkada dapat membangun karakteristik tersendiri dalam memberikan dukungan dalam Pilkada.

Keterlibatan tokoh adat, atau elite lokal dalam Pilkada dapat membangun basis dukungan yang baik kepada seorang calon kepala daerah, keterlibatan tokoh local dapat memunculkan stigma keberpihakan elit dengan memberikan dukungan

---

<sup>16</sup>[https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/syarat\\_calon/SYARAT\\_CALON\\_WAKADA\\_2\\_0139050\\_105\\_MARFENDI.pdf](https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/syarat_calon/SYARAT_CALON_WAKADA_2_0139050_105_MARFENDI.pdf) diakses pada 03 Januari 2022 pukul 21.32

kepada salah satu calon. Peranan elite lokal yang sering disegani oleh masyarakat dan memiliki pengaruh di dalam masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung dapat memotori perilaku masyarakat untuk menetapkan pilihannya sehingga mendapat hasil saat Pilkada, hal ini merupakan dasar awal peneliti untuk mengangkat penelitian skripsi kali ini dengan meneliti peranan elit local suatu etnis dalam pilkada.

Pelaksanaan Pilkada yang tidak terlepas dari peranan *niniak mamak* yang mendukung calon kepala daerah untuk maju dan naik menjadi kepala daerah. Sama halnya di kota Bukittinggi pada pemilihan kepala daerah terlepas dari peran *Niniak Mamak, Penghulu, Pemangku Adat Kurai* dalam mendukung pasangan yang dirasa cocok. Dengan harapan berperannya *Niniak Mamak* dalam pemilihan kepala daerah akan diikuti oleh masyarakat atau anak kemenakannya dalam menentukan pilihan.

*Niniak Mamak* yang *didahulukan salangkah dan ditinggikan sarantiang* dalam sebuah Nagari atau Suku yang dipercayai oleh masyarakat anak kemenakannya dan juga sebagai tempat bermusyawarah bagi anggota kaumnya. *Niniak mamak* sendiri adalah sebagai panutan oleh anggota kaum, anak kemenakannya. Hubungan yang terjalin antara *Niniak Mamak* dan anggota kaumnya yang sudah ada sejak dahulu.

Adanya keterlibatan penghulu, *niniak mamak*, pemuka adat dalam Pilkada merupakan salah satu bentuk atau dukungan kepada calon kepala daerah. Penghulu, *niniak mamak*, dan pemuka adat mempunyai calon kepala daerah

masing masing yang didukung untuk maju pada Pilkada, seperti yang di kutip dari skripsi Indra Kardian wawancara dengan Komisioner KPU Kota Bukittinggi<sup>17</sup>

“Setiap pasangan calon mendapatkan dukungan dari penghulu atau niniak mamaknya masing-masing. Terlihat pada saat pencalonan ke KPU para niniak mamak tersebut memberikan dukungan kepada pasangan kandidat yang di dukungnya dengan menjadi penasehat para pasangan kandidat, dan ada juga sebagai tim sukses dari pasangan masing-masing. Tim sukses merupakan sebuah kelompok orang yang dibentuk secara bersama-sama oleh masingmasing pasangan calon kandidat. Dalam hal ini tim sukses dari pasangan Ramlan Nurmatias dan Irwandi ini adalah berisikan orang-orang pilihan dari pasangan calon tersebut. Merekalah yang nantinya mendukung secara langsung dan menyusun langkah-langkah agar calon yang mereka ajukan tersebut bisa memenangkan perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah. Pasangan Ramlan Nurmantias-Irwandi juga mendapatkan dukungan dari para penghulu atau niniak mamak yang ada di kota Bukittinggi.”

Begitu juga dengan penelitian lain yang dijadikan referensi dengan judul pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Pada Tahun 2013 karangan Irfan Zharfandy yang mengatakan Terdapat tiga faktor yang melatar belakangi politik identitas yaitu pertama masyarakat *hierarkis (patron-klien)*, kedua *polarisasi politik* oleh elite lokal, ketiga *regulasi pemerintah* (kebijakan desentralisasi dan pemilihan umum). Ketiga faktor tersebut dianggap berperan penting terhadap pembentukan dan sistematis pengaruh yang memunculkan politik identitas pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013. Masyarakat Sulawesi Selatan yang taat akan nilai nilai budaya dan agamanya berdampak pada mudahnya terimobilisasi oleh kepentingan elite lokal etnis yang berupaya untuk mencapai kekuasaan dalam panggung politik. Budaya

---

<sup>17</sup> Kardian, Indra. 2017. Peran Elit Tradisional Dalam Mendukung Pasangan Calon Independen M. Ramlan Nurmantias Dan Irwandi Pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2015. *Skripsi*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Padang. Hal 12

patronase memperkuat politik identitas dengan mengembangkan sentimen kedaerahan dan etnisitasnya.

Namun yang menariknya pada Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020 lalu dimenangkan oleh pasangan Erman safar – Marfendi seperti yang dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Perolehan Suara Pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020**

No Urut	Pasangan Calon	Partai Pendukung	Perolehan Suara
1	Ramlan Nurmatias - Syahrizal	Perseorangan/ Independen dan didukung oleh partai (Demokrat, PPP, PBB, PDI-P, Hanura)	22.782 ribu suara
2	Erman Safar - Marfendi	Gerindra, PKS, Golkar	24.650 ribu suara
3	Irwandi David Chalik	PAN, PKB, NasDem	7.972 ribu suara

Sumber : data sekunder KPU Kota Bukittinggi tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.3 diatas dapat dilihat bahwa pasangan nomor urut dua memperoleh suara sebanyak 24.650 ribu suara yang berarti bahwa pada Pilkada 2020 dimenangkan oleh pasangan nomor urut dua Erman Safar – Marfendi yang Erman Safar sendiri bukan merupakan *Urang Kurai*. Melihat di Kota Bukittinggi perkembangan dinamika politik pada masa 2015 dan 2020 yang dialami oleh calon kepala daerah kala itu berbeda. Pilkada tahun 2020 merupakan pertama pertama yang diikuti oleh Erman Safar. Perbedaan jumlah suara yang tipis dengan

pasangan Ramlan Nurmatias – Syahrizal merupakan suatu bentuk implementasi secara empirik pengaruh dari identitas politik.

Dt Parpatiah sebagai niniak mamak *Urang Kurai* memberikan pernyataan sebagai berikut :

*“Sarancaknyo nan manjadi pemimpin atau walikota emang dari kurai, tapi dek kini ko masyarakat labiah condong ka pak erman dan suaronyo basalisiah sagetek. Dek masyarakat telah memilih itu, untuak kamukonyo sarancaknyo Urang Kurai.”*

*“sebagusnyo yang manjadi pemimpin atau walikota memang dari suku kurai, tetapi karena saat ini masyarakat lebih mengarah kepada bapak erman dan suaranya hanya berselisih sedikit. Dan masyarakat telah memilih itu, untuk kedepannya sebagusnyo *Urang Kurai*”<sup>18</sup>*

Menurut kutipan peneliti dari *Jurnal Studi Pemerintahan* yang ditulis oleh Irawati berjudul *Identitas Kultural dan Gerakan Politik Kerapatan Adat Kurai dalam Representasi Politik Lokal*.<sup>19</sup>

Secara historis kota-kota di Sumatera Barat sebenarnya sudah memiliki pengalaman dengan Pemerintahan Nagari. Demikian juga dengan Kota Bukittinggi sudah memiliki sejarah yang panjang tentang Pemerintahan Nagari. Kota Bukittinggi sendiri merupakan wilayah sebuah Nagari yang disebut Nagari Kurai Limo Jorong. Pemilihan walikota yang selama Orde Baru sangat sentralis, dengan UU baru diserahkan pada DPRD masing-masing. Situasi politik di Kota Bukittinggi pada 1999-2000 juga menjadi hangat karena pada saat ini bertepatan dengan pemilihan walikota dan wakil walikota. Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia isu *“putera asli daerah”*. Kota Bukittinggi yang pada 2000 harus memilih walikota baru juga tak luput dari isu ini. Dua pasangan calon yang maju untuk pemilihan walikota oleh DPRD mendapat hembusan isu soal putera daerah. Pasalnya salah satu pasangan calon walikota yaitu Drs. Djufri bukan merupakan orang asli Kurai yang diklaim sebagai penduduk asli Bukittinggi. Namun dalam pemilihan walikota yang dilakukan oleh DPRD hasil pemilu 1999 memenangkan pasangan Djufri-Khairul Hamdi sebagai

<sup>18</sup> Wawancara dengan Dt. Parpatiah selaku niniak mamak *urang kurai* pada hari senin, 19 April 2021 pukul 16.00 di warung daerah tigo baleh

<sup>19</sup> Irawati. 2012. Identitas Kultural dan Gerakan Politik Kerapatan Adat Kurai dalam Representasi Politik Lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*. Vol 3 (1) Hal 80

Walikota dan Wakil Walikota periode 2000-2005. Kekalahan orang Kurai asli ini oleh beberapa orang<sup>20</sup> tokoh menjadi isu yang kemudian dipertahankan dan dihembuskan.

Berdasarkan data yang telah peneliti jabarkan sebelumnya peneliti mengambil asumsi, Kota Bukittinggi yang pada beberapa periode terakhir dipimpin oleh penduduk aslinya yang dinamakan *Urang Kurai* dimana isu ini mulai muncul ketika Djufri yang bukan orang *Kurai* menjadi walikota Kota Bukittinggi pada masa orde baru yang pemilihannya diserahkan kepada DPRD. Isu tersebut semakin mengyat ketika Ramlan Nurmatias-Irwandi yang naik menjadi walikota Bukittinggi periode 2015-2020 yang merupakan masyarakat asli *Kurai* dan mendapatkan dukungan dari niniak mamak *pucuk bulek* 26 Kurai. Adanya keterlibatan niniak mamak urang *Kurai* dalam kemengan calon kepala daerah Kota Bukittinggi pada Pilkada 2020 berperan penting dalam memberikan dukunga kepada kemenakan dan anggota kaumnya pada proses Pilkada periode berikutnya.

Hal ini menarik bagi peneleiti terjadi pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 lalu di kota Bukittinggi yang dimenangkan oleh pasangan nomor urut dua oleh Erman Safar – Marfendi dimana Erman Safar yang bukan berasal dari *Suku Kurai / Urang Kurai*. Erman Safar sendiri bukan merupakan *Urang Kurai* asli melainkan *Urang Kamang*<sup>21</sup> tetapi bertempat tinggal di Kota Bukittinggi. Tidak menjamin *Urang Kurai* menjadi pemimpin di Kota Bukittinggi dari aspek banyaknya pendatang baru atau masyarakat yang heterogen menjadikan identitas

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hal 81

<sup>21</sup> Salah satu nama daerah yang ada di Kabupaten Agam terletak di Kecamatan Kamang Magek



Kurai tidak berpengaruh. Dengan kemenangan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana politik identitas *Urang Kurai* di Kota Bukittinggi dalam menentukan pilihan pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Identitas yang penulis maksud disini adalah dimana masyarakat Kota Bukittinggi yang kental dengan *Urang Kurai* dan sangat menghormati niniak mamak, pemangku adat, penghulu Kurai. Apakah niniak mamak ikut terlibat menentukan politik identitas seorang calon yang akan memimpin Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan Pilkada yang dimana niniak mamak menjadi tim sukses calon. Setiap calon yang maju pada pilkada kota Bukittinggi biasanya meminta restu kepada niniak mamak *Urang Kurai*.

Agar penelitian ini menjadi lebih terarah dan ruang lingkup tidak terlalu luas maka berdasarkan latar belakang penelitian diatas permasalahan yang akan diteliti secara rinci oleh peneliti adalah : **Bagaimana Legitimasi Politik Identitas Masyarakat Kurai Pada Pilkada Kota Bukittinggi Tahun 2020 ?**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan legitimasi politik identitas masyarakat Kurai pada pilkada Kota Bukittinggi tahun 2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara akademis maupun teoritis, sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam khasanah Ilmu Politik khususnya dalam pembahasan politik identitas pada Pilkada tahun 2020. Serta dapat memperkaya dan memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya studi politik lokal dan politik Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber relevansi mengenai politik identitas bagi mahasiswa dan masyarakat umum sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya yang dapat digunakan oleh peneliti di masa yang akan datang ataupun oleh lembaga kemasyarakatan, khususnya memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang Ilmu Politik.

